
TANTANGAN PERTAHANAN NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Ahmad Fanani¹, I Wayan Midhio², Afrizal Hendra³
Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia¹
Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia²
Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia³

Coresspondence Email: Ahmadfanani.kerja@gmail.com

Abstract

Golden Indonesia 2045 is a long-term vision launched to mark 100 years of Indonesian independence. This vision covers various aspects of development, including economic, social and defense. National defense policy is one of the key elements in ensuring the achievement of this vision, considering the importance of national stability and security as the foundation for sustainable development. This research aims to see the challenges in the aspect of national defense towards a golden Indonesia 2045 and the role of national defense in realizing a golden Indonesia 2045. The research method used is a literature study involving analysis of documents, books, journal articles and information from official websites. Indonesian national defense. The findings obtained by researchers in this research are that there are several challenges faced by Indonesian national defense such as Economic and Resource Challenges: Defense Budget Limitations and the Need for Military Modernization, Institutional and Bureaucratic Challenges: The Need for Reform of Defense Institutions and Bureaucracy and Budget Limitations and Priorities National: Balancing Economic Development and Defense Investment. Meanwhile, the role of national defense in realizing a Golden Indonesia 2045 is implementing Defense Diplomacy in the context of international cooperation in maintaining regional security and building national resilience and responding to non-conventional threats. Non-conventional threats such as terrorism, separatism, cyber attacks and climate change.

Keywords: *Defense, Military, Geopolitics, Golden Indonesia 2045.*

Abstrak

Indonesia Emas 2045 adalah visi jangka panjang yang dicanangkan untuk menandai 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Visi ini mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan pertahanan. Kebijakan pertahanan negara menjadi salah satu elemen kunci dalam memastikan tercapainya visi tersebut, mengingat pentingnya stabilitas dan keamanan nasional sebagai fondasi bagi pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tantangan pada aspek pertahanan nasional untuk menuju Indonesia emas 2045 serta peran dari pertahanan nasional dalam mewujudkan Indonesia emas 2045. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang melibatkan analisis dokumen, buku, artikel jurnal, dan informasi dari situs web resmi pertahanan nasional Indonesia. Adapun temuan yang didapat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pertahanan nasional Indonesia seperti Tantangan Ekonomi dan Sumber Daya: Keterbatasan Anggaran Pertahanan dan Kebutuhan Modernisasi Militer, Tantangan Kelembagaan dan Birokrasi: Kebutuhan Reformasi Institusi Pertahanan dan Birokrasi dan Keterbatasan Anggaran dan Prioritas Nasional: Menyeimbangkan Pembangunan Ekonomi dan Investasi Pertahanan. Sedangkan peran pertahanan nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah melaksanakan Diplomasi Pertahanan dalam konteks kerjasama Internasional dalam Menjaga Keamanan Kawasan dan Membangun Ketahanan Nasional dan Respon Terhadap Ancaman Non-Konvensional Ancaman non-konvensional seperti terorisme, separatisme, serangan siber, dan perubahan iklim.

Kata kunci: *Pertahanan, Militer, Geopolitik, Indonesia Emas 2045.*

Received	:	20 November 2024
Accepted	:	27 November 2024
Published	:	30 November 2024
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <u>Creative Commons Attribution 4.0 International License</u> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. LATAR BELAKANG

Indonesia, dengan keanekaragaman budaya, sumber daya alam yang melimpah, dan posisinya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi negara super power. Dalam mewujudkan visi besar untuk Indonesia Emas 2045, salah satunya adalah memiliki pertahanan yang kuat diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang semakin kompleks. Pada era globalisasi, tantangan-tantangan seperti dinamika geopolitik, perubahan iklim, krisis kesehatan global, dan ketidakpastian ekonomi menjadi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi stabilitas dan keamanan suatu negara (Permana, 2022).

Visi Indonesia Emas 2045 merupakan cetak biru pembangunan yang dirancang untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada peringatan satu abad kemerdekaannya. Pada tahun 2045, Indonesia diharapkan akan mencapai posisi sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dengan tingkat kesejahteraan dan keadilan sosial yang tinggi, serta tatanan demokrasi yang matang dan stabil. Untuk mencapai visi ini, penguatan di berbagai sektor sangat diperlukan, salah satunya adalah sektor pertahanan. Transformasi pertahanan menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa kemajuan ekonomi dan politik yang dicita-citakan dalam Visi Indonesia Emas dapat tercapai dalam lingkungan yang aman dan stabil. Mengingat dinamika global dan regional yang semakin kompleks, Indonesia perlu memperkuat kapasitas militernya, memperbarui doktrin pertahanan, serta meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman kontemporer, baik yang bersifat konvensional maupun non-konvensional. Tantangan seperti terorisme, ancaman siber, hingga persaingan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik memerlukan adaptasi strategi pertahanan yang lebih komprehensif. Selain itu, Indonesia juga dihadapkan pada perubahan besar dalam sifat konflik global dan teknologi perang (UNODA: 2022).

Perkembangan teknologi yang cukup pesat dapat menciptakan teknologi baru yang memiliki tujuan bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara. Contoh terbaru adalah penyalahgunaan media sosial untuk menghasut kerusuhan atau merekrut sel-sel teroris baru. Teknologi baru termasuk diantaranya *advanced computing*, *artificial intelligence (AI)*, *big data analytics*, *biotechnology*, *directed energy*, *robotics*, *hypersonics*, and *autonomy* yang akan mempengaruhi siapa sebagai pemenang perang di masa depan (Mattis, 2018). Hal ini mempengaruhi bentuk strategi pertahanan yang dipilih oleh masing-masing negara termasuk

Indonesia. Perang pada masa ini telah bergeser dari medan tempur fisik ke ranah digital dan informasi, dengan berkembangnya konsep perang hibrida yang menggabungkan operasi militer dengan aspek-aspek non-militer seperti propaganda, sabotase ekonomi, dan serangan siber. Ancaman yang muncul tidak hanya dalam bidang militer, namun telah merambah juga kedalam ancaman non militer yang sarat dipengaruhi perkembangan teknologi. Adanya beragam ancaman baik yang bersifat ancaman aktual maupun ancaman potensial, baik ancaman militer, non militer, maupun hibrida dapat berevolusi menjadi sebuah ancaman strategis yang mengancam kedaulatan Negara, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan Bangsa dan Negara (Zelikow: 2020).

Oleh karena itu, untuk melindungi kedaulatan dan integritas nasional, transformasi strategi pertahanan menjadi langkah yang tak terhindarkan. Seiring dengan upaya pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengadaptasi strategi pertahanan nasionalnya. Beberapa tantangan utama yang perlu diatasi antara lain: 1. Dinamika Geopolitik Global dan Regional: Indonesia berada di tengah-tengah persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini menimbulkan risiko ketidakstabilan dan memerlukan keseimbangan diplomasi serta kemampuan militer yang kuat. 2. Ancaman Non-Konvensional: Perang hibrida, terorisme, keamanan siber, dan ancaman lingkungan merupakan bentuk-bentuk ancaman baru yang membutuhkan strategi pertahanan yang lebih fleksibel dan inovatif. 3. Keterbatasan Anggaran: Keterbatasan anggapan pertahanan sering kali menjadi hambatan bagi modernisasi militer dan pengembangan teknologi pertahanan yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman masa depan. 4. Birokrasi dan Kelembagaan: Struktur birokrasi yang kompleks sering kali menghambat efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan strategis dalam sektor pertahanan. Reformasi kelembagaan menjadi faktor kunci untuk memastikan transformasi strategi pertahanan berjalan lancar (Bateman: 2021). Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis tantangan-tantangan tersebut secara mendalam guna memberikan landasan yang kuat dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang efektif menuju Indonesia Emas 2045. Makalah ini bertujuan untuk Menganalisis proyeksi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam transformasi pertahanan menuju Indonesia Emas 2045.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi kepustakaan (Mardalis, 1999). Hal ini karena data dikumpulkan pelbagai informasi dan data melalui pelbagai bahan yang di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan, hasil penelitian, dan sebagainya. Sugiyono (2019) mengartikan studi pustaka sebagai kajian teoritis, referensi, dan studi literatur yang terkoneksi dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada penelitian sosial. Sementara, Arikunto (2019) mengartikan studi pustaka sebagai metode mengumpulkan data dengan mencari informasi melalui buku, koran, dan literatur yang bertujuan untuk menyusun teori. Dalam studi ini, penelitian kepustakaan dimaknai sebagai kajian literatur yang menelusuri penelitian terdahulu guna dikritisi atau dilanjutkan. Sumber pustaka berupa jurnal penelitian ilmiah, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, tulisan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah dan lembaga- lembaga yang lain. Kesimpulan penelitian kepustakaan dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari beberapa sumber pustaka kemudian diolah dan disajikan sehingga memperoleh temuan baru.

3. HASIL dan PEMBAHASAN

Indonesia Emas 2045 adalah visi strategis yang dirancang untuk mewujudkan kemajuan Indonesia di usia satu abad kemerdekaannya. Visi ini mencakup tujuan besar di sektor ekonomi, politik, sosial, dan pertahanan yang akan menjadikan Indonesia salah satu negara maju dan sejahtera di dunia. Dalam aspek ekonomi, Indonesia Emas 2045 menargetkan negara menjadi kekuatan ekonomi global, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang besar dan distribusi kemakmuran yang merata. Diproyeksikan Indonesia dapat masuk dalam lima besar ekonomi dunia pada 2045 dengan pendapatan per kapita mencapai USD 23.199, serta penurunan tingkat kemiskinan menjadi di bawah 5%. Secara politik, visi ini menekankan penguatan demokrasi dan stabilitas nasional, di mana pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indonesia juga diharapkan memiliki sistem politik yang lebih mapan, dengan institusi demokrasi yang kuat dan kebijakan luar negeri yang aktif. Salah satu tujuan utama adalah memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional di ASEAN dan pemain kunci di Indo-Pasifik, dengan mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan di kawasan tersebut (World Bank: 2022).

Dari segi sosial, Indonesia Emas 2045 mencita-citakan masyarakat yang adil dan makmur, dengan akses yang merata terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Tujuan utama adalah menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi faktor kunci untuk mempersiapkan generasi muda yang inovatif, kreatif, dan mampu bersaing di kancah global. Dalam konteks ini, pembangunan di sektor pertahanan menjadi bagian integral dari pencapaian visi tersebut. Visi Indonesia Emas 2045 juga menyadari bahwa stabilitas keamanan, baik di dalam negeri maupun dalam konteks regional dan global, merupakan syarat utama untuk mencapai tujuan ekonomi, politik, dan sosial yang berkelanjutan.

TANTANGAN GLOBAL DAN REGIONAL YANG DIHADAPI INDONESIA

Perubahan Dinamika Geopolitik Global: Meningkatnya Ketegangan antara Negara Besar dan Dampaknya terhadap Asia Tenggara (Indonesia)

Situasi politik global dan regional masih akan diwarnai dengan perebutan kepentingan, pengaruh, sumber daya, dan wilayah. Saat ini Partai Komunis Tiongkok/PKT sedang menapaki jalan memperkuat militernya untuk bersiap perang dan perlombaan persenjataan militer menyaingi AS. RRT sekarang dijuluki sebagai badan ekonomi kedua terbesar di dunia, dan pasukan militernya juga diakui sebagai kekuatan ketiga terbesar dunia. Saat ini PKT sedang berambisi menyebarkan ideologi mereka, ideologi komunis (Zang Shan: 2016). Amerika juga sedang menyesuaikan kembali strategi perangnya di Asia. Di wilayah Asia Tenggara, militer AS dalam rangka melakukan *rebalancing power* telah membuka pos baru di Darwin, Australia, serta melakukan penandatanganan *Defence Cooperation Agreement (DCA)* dengan Singapura dan sedang membujuk Filipina untuk membolehkan kembali militer AS “nongkrong” di Subic Bay. Bagi Singapura, penandatanganan DCA antara Singapura dan AS selain memperkuat hubungan bilateral kedua negara, juga sebagai sarana menjaga keseimbangan hubungan dengan Tiongkok. Apalagi Singapura berupaya netral dan menjadi broker yang bijaksana dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN seperti Brunei, Malaysia, Vietnam dan Filipina. Terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden AS akan dapat mempengaruhi hubungan AS dengan dunia Islam menjadi semakin memanas, setelah pernyataannya yang kontroversial terkait pelarangan umat

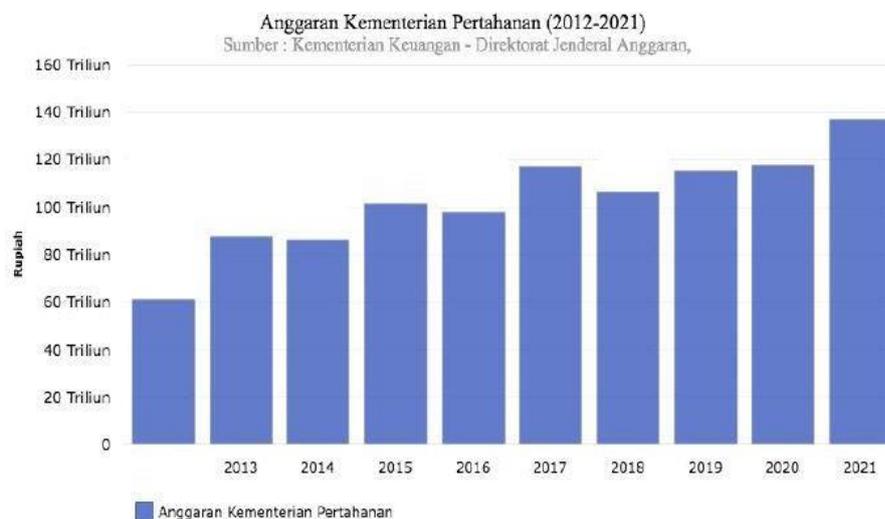
Islam berkunjung ke AS. Begitu juga dengan ISIS masih tetap menjadi prioritas perhatian utama, karena ancaman terorisme tetap akan mewarnai politik internasional (Erlangga: 2015).

Dalam beberapa dekade terakhir, geopolitik global telah mengalami perubahan signifikan, terutama terkait dengan rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Persaingan strategis ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, teknologi, dan pengaruh militer, yang berdampak langsung pada kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok memuncak seiring dengan kebijakan ekonomi agresif, terutama melalui kebijakan luar negeri Tiongkok yang berfokus pada Belt and Road Initiative (BRI) dan dominasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Amerika Serikat, di sisi lain, berupaya menjaga pengaruhnya melalui perjanjian perdagangan, aliansi militer, dan komitmen pertahanan terhadap negara-negara sekutu, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Bagi Indonesia, ketegangan ini menciptakan dilema strategis karena negara harus menavigasi hubungan dengan kedua kekuatan besar tanpa terlibat terlalu jauh dalam konflik geopolitik yang terjadi.

Laut Natuna Utara, sebagai bagian dari kawasan Laut Cina Selatan, merupakan salah satu titik panas dari ketegangan ini. Tiongkok mengklaim sebagian wilayah laut tersebut sebagai bagian dari sejarah "Sembilan Garis Putus-Putus" mereka, sementara Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional dan bahwa wilayah Laut Natuna adalah bagian dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia sesuai dengan hukum laut internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Perselisihan ini menempatkan Indonesia dalam posisi sulit, karena harus menyeimbangkan hubungan ekonomi yang erat dengan Tiongkok, sembari menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya. Secara keseluruhan, ketegangan antara AS dan Tiongkok juga berdampak pada keamanan maritim di wilayah Indo-Pasifik, terutama dalam hal kebebasan navigasi dan perdagangan. Amerika Serikat telah meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut melalui latihan bersama dan patroli, sedangkan Tiongkok terus memperkuat pangkalan militer di Laut Cina Selatan. Bagi Indonesia, situasi ini menuntut penguatan diplomasi pertahanan dan aliansi regional untuk menjaga stabilitas kawasan, sekaligus memperkuat postur pertahanan maritim (Slaughter: 2017).

Tantangan Ekonomi dan Sumber Daya: Keterbatasan Anggaran Pertahanan dan Kebutuhan Modernisasi Militer

Setiap negara memiliki kondisi ideal mengenai bagaimana seharusnya industri pertahanan mereka beroperasi. Secara ideal, setiap negara, dalam hal ini sering kita jumpai di negara – negara maju, didukung dan memiliki anggaran pertahanan negara yang besar. Dari anggaran pertahanan tersebut, sebesar 20-30% dialokasikan untuk industri pertahanan (Karim, 2020). Bagi Indonesia, masih terdapat gap atau hambatan mengenai anggaran pertahanan negara, yang menjadi dukungan dari pengembangan industri pertahanan. Dukungan anggaran belanja pertahanan Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. Gap anggaran ini menjadi sangat krusial bagi pengembangan industri pertahanan karena untuk membentuk sebuah industri pertahanan yang kuat, dibutuhkan anggaran Research & Development (R&D) yang besar. Untuk mampu mencapai industri pertahanan yang kuat, Indonesia harus mampu menutup gap yang ada di bidang anggaran. Kenyataannya, kemampuan keuangan Indonesia dalam mendukung industri pertahanan masih sangat terbatas. Hal ini dapat kita lihat dari belanja pertahanan Indonesia, dan rasio anggaran R&D per GDP Indonesia yang masih minim. Pada tahun anggaran 2022, Kementerian Pertahanan termasuk kementerian yang memperoleh pagu anggaran yang cukup besar, yaitu Rp 133,9 triliun (Kementerian Keuangan, 2021).



Gambar 1. Anggaran kementerian Pertahanan (2012-2021)
Sumber: Kementerian Keuangan (2021).

Gambar di atas menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan sektor pertahanannya saat ini adalah keterbatasan anggaran. Meskipun Indonesia telah meningkatkan alokasi anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir, anggarannya masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, seperti Singapura dan Thailand. Pada 2023, anggaran pertahanan Indonesia hanya sekitar 0,8% dari PDB, yang jauh dari target ideal untuk mendukung modernisasi militer dan pengembangan teknologi pertahanan. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada kemampuan Indonesia untuk melakukan modernisasi alutsista (alat utama sistem senjata) yang diperlukan untuk menghadapi ancaman konvensional dan non-konvensional. Banyak peralatan militer yang digunakan oleh TNI sudah ketinggalan zaman dan memerlukan pembaruan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia berencana untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pengadaan pesawat tempur, kapal perang, dan sistem pertahanan udara. Namun, masih diperlukan reformasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa anggaran pertahanan dikelola dengan efisien dan transparan.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan melalui program offset dan kerjasama internasional, kemampuan industri dalam negeri masih terbatas dalam hal produksi teknologi militer canggih. Indonesia harus terus mendorong pengembangan industri pertahanan melalui transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga negara tidak terlalu bergantung pada impor senjata dari negara asing.

Tantangan Kelembagaan dan Birokrasi: Kebutuhan Reformasi Institusi Pertahanan dan Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya melakukan reformasi atau perubahan mendasar terhadap sistem administrasi pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan aspek kelembagaan (organisasi), manajemen (proses kerja), dan sumber daya manusia. Reformasi birokrasi merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik pada sektor birokrasi. Dengan melakukan berbagai upaya seperti penyederhanaan prosedur administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia, dan inovasi kebijakan, sistem administrasi negara

diharapkan dapat berfungsi dengan baik atau dibenahi (Lemhanas: 2024). Salah satu tantangan terbesar dalam mentransformasi strategi pertahanan Indonesia adalah hambatan kelembagaan dan birokrasi. Sistem birokrasi di Indonesia sering kali ditandai oleh proses yang lambat, fragmentasi antar-lembaga, serta koordinasi yang kurang efektif antara berbagai instansi terkait. Dalam konteks pertahanan, reformasi kelembagaan menjadi penting untuk memastikan bahwa transformasi strategi dapat dijalankan dengan lancar dan adaptif terhadap perubahan ancaman global. Kementerian Pertahanan dan TNI perlu melakukan reformasi internal untuk meningkatkan koordinasi antar-angkatan dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Salah satu contoh nyata adalah pentingnya peningkatan interoperabilitas antara Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk menghadapi ancaman hibrida yang membutuhkan respons lintas domain. Saat ini, masih terdapat masalah dalam hal pembagian wewenang yang sering menyebabkan keterlambatan dalam merespons ancaman yang muncul, baik dari segi militer maupun non-militer.

Selain itu, ada tantangan besar dalam merampingkan birokrasi pertahanan. Banyak keputusan strategis tertunda karena tumpang tindih regulasi dan proses pengadaan yang lambat. Misalnya, proses pengadaan alutsista yang harus melalui berbagai tahapan administratif sering kali memperlambat implementasi modernisasi militer. Dibutuhkan reformasi yang mendalam agar proses-proses ini lebih efisien, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan ancaman keamanan. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi isu penting. Transformasi strategi pertahanan yang berkelanjutan memerlukan komitmen untuk memperbaiki tata kelola dalam pengadaan, manajemen sumber daya, dan pengembangan kapasitas pertahanan. Reformasi kelembagaan ini sangat penting agar Indonesia dapat beradaptasi dengan tantangan masa depan.

Pergeseran Paradigma Perang: Dari Perang Konvensional Menuju Perang Hibrida dan Peran Militer dalam Konflik Asimetris

Mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu, mengatakan perang asimetris merupakan metode peperangan gaya baru secara non militer, namun daya hancurnya tidak kalah bahkan lebih dahsyat daripada perang militer. Perang asimetris memiliki medan atau lapangan tempur luas meliputi segala aspek kehidupan. Ada dua bentuk dalam perang asimetris. Pertama, melalui aksi massa di jalanan dalam rangka menekan target

sasaran. Kedua, melalui meja para elite politik dan pengambil kebijakan negara agar setiap kebijakan sejalan dan pro asing. Adapun sasaran dalam perang asimetris, yaitu membelokkan sistem sebuah negara sesuai kepentingan kolonialisme; melemahkan ideologi serta mengubah pola pikir rakyatnya; menghancurkan ketahanan pangan dan energi; selanjutnya, menciptakan ketergantungan negara target atas kedua hal tersebut.

Paradigma perang di abad ke-21 telah berubah secara signifikan (Yarger: 2008). Dari perang konvensional antar-negara, kini konflik sering kali melibatkan aktor non-negara, teknologi canggih, dan penggunaan taktik perang hibrida yang menggabungkan operasi militer, informasi, ekonomi, dan siber. Indonesia perlu mengubah strategi pertahanannya untuk menghadapi ancaman-ancaman ini yang semakin sulit diidentifikasi dan diatasi dengan pendekatan militer tradisional (Strachan: 2013). Salah satu bentuk ancaman hibrida adalah konflik siber yang semakin meningkat, baik dari aktor negara maupun non-negara. Serangan siber yang dapat melumpuhkan infrastruktur kritis seperti sistem komunikasi, listrik, dan keuangan menjadi salah satu ancaman utama bagi Indonesia. Pada 2020, Indonesia menghadapi peningkatan drastis dalam jumlah serangan siber, terutama di sektor pemerintah dan perbankan. Untuk menghadapi ancaman ini, transformasi strategi pertahanan harus mencakup peningkatan kapasitas pertahanan siber, baik dalam bentuk investasi teknologi maupun peningkatan keterampilan personel.

Selain itu, ancaman terorisme dan ekstremisme juga merupakan bentuk konflik asimetris yang terus berkembang. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi kelompok teroris domestik seperti Jemaah Islamiyah dan kelompok-kelompok afiliasi ISIS yang beroperasi di wilayah Asia Tenggara. TNI, bersama dengan kepolisian, telah berhasil melakukan sejumlah operasi untuk melumpuhkan kelompok-kelompok ini, tetapi tantangan ke depan adalah bagaimana mengatasi radikalisme dan terorisme yang berkembang secara online. Ini membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya melibatkan militer, tetapi juga lembaga intelijen, sipil, dan diplomatik.

Keterbatasan Anggaran dan Prioritas Nasional: Menyeimbangkan Pembangunan Ekonomi dan Investasi Pertahanan

Salah satu tantangan mendasar dalam transformasi strategi pertahanan Indonesia adalah keterbatasan anggaran. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kebutuhan pembangunan

nasional sering kali membuat anggaran pertahanan harus bersaing dengan prioritas lain, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 2023, anggaran pertahanan Indonesia hanya sekitar 0,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura (3,1%) dan Vietnam (2,2%). Keterbatasan anggaran ini membatasi kemampuan Indonesia untuk melakukan modernisasi alutsista dan pengembangan teknologi pertahanan mutakhir. Selain itu, kebutuhan untuk meningkatkan gaji personel militer dan memodernisasi sistem persenjataan menambah beban pada anggaran pertahanan. Menyeimbangkan antara kebutuhan operasional dan investasi jangka panjang dalam modernisasi pertahanan menjadi dilema bagi Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan prioritas yang lebih terfokus pada sektor-sektor pertahanan yang paling kritis, seperti penguatan pertahanan maritim dan udara, serta pertahanan siber.

Namun, penting juga untuk diingat bahwa keamanan nasional bukan hanya tentang kekuatan militer. Ketahanan ekonomi, stabilitas sosial, dan keamanan energi juga merupakan bagian integral dari strategi pertahanan yang holistik. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan multi-sektor dalam kebijakan pertahanannya, di mana pembangunan ekonomi dan investasi di sektor pertahanan berjalan beriringan. Peningkatan kemandirian industri pertahanan, sebagaimana telah dibahas dalam strategi transformasi, juga dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia pada alutsista impor dan menekan biaya jangka panjang.

Peran Pertahanan Nasional dalam Mendukung Visi Indonesia Emas 2045

Pertahanan nasional merupakan pilar penting dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045, karena stabilitas keamanan nasional adalah prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi, kemajuan politik, dan kohesi sosial. Dalam konteks ini, sektor pertahanan tidak hanya berperan dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman militer konvensional, tetapi juga dari ancaman non-konvensional seperti terorisme, siber, dan bencana alam yang dapat merusak infrastruktur dan kesejahteraan nasional. Salah satu strategi penting yang ditetapkan dalam visi ini adalah pengembangan konsep Pertahanan Semesta, yang melibatkan seluruh elemen bangsa dalam menjaga keamanan negara. TNI (Tentara Nasional Indonesia) memainkan peran sentral dalam sistem ini, dengan memperkuat kesiapan operasional melalui

modernisasi peralatan militer, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyesuaian doktrin pertahanan yang mampu menjawab tantangan keamanan di masa depan.

Pertahanan Indonesia ke depan juga diharapkan mampu memaksimalkan diplomasi pertahanan sebagai instrumen penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Diplomasi pertahanan Indonesia telah menunjukkan efektivitasnya, terutama dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara ASEAN dan kekuatan besar dunia, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Indonesia juga harus memperkuat perannya dalam forum-forum multilateral seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) dan East Asia Summit (EAS) untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik tetap stabil dan bebas dari konflik besar. Selain itu, pembangunan postur pertahanan nasional yang lebih modern dan adaptif menjadi prioritas utama. Dalam upaya menjaga kedaulatan wilayah, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan maritim seperti Laut Natuna Utara yang strategis, Indonesia membutuhkan kemampuan militer yang lebih maju, termasuk alutsista (alat utama sistem senjata) yang mutakhir, angkatan laut yang kuat, serta kemampuan pengawasan udara dan maritim yang memadai. Pentingnya stabilitas keamanan juga tercermin dalam berbagai program pengembangan infrastruktur pertahanan, seperti Pembangunan pangkalan militer di wilayah strategis dan peningkatan kualitas teknologi pertahanan. Pertahanan yang tangguh akan menciptakan deterensi terhadap ancaman dari luar, sehingga dapat mengurangi potensi konflik yang merugikan pembangunan ekonomi dan politik nasional.

Pentingnya Diplomasi Pertahanan: Kerjasama Internasional dalam Menjaga Keamanan Kawasan

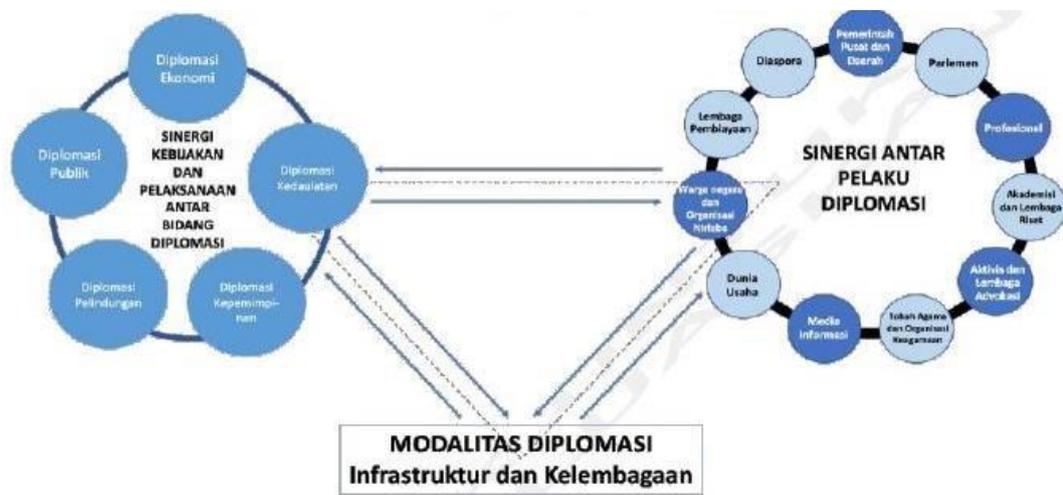
Menurut Mihal Marcel (2014) konsep diplomasi pertahanan makin mengemuka pasca perang dingin yaitu sekitar pertengahan 1990an. Dalam perkembangannya instrumen militer kerap digunakan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri. Hal ini penting untuk mengatasi persoalan keamanan regional dan global terutama untuk menciptakan perdamaian yang langgeng. Menurut Marcel, konsep diplomasi pertahanan merupakan suatu upaya pengembangan kerjasama yang koheren di semua tingkatan dalam kerjasama antar negara di bidang keamanan dan militer dengan dampak yang riil. Dampak riil kegiatan ini berupa penguatan kelembagaan, pengembangan dialog strategis, pertukaran informasi, mendorong stabilitas lewat kerjasama, melakukan tindakan yang mendorong saling percaya dan

peningkatan keamanan, serta memperbaiki kontrol demokratis, reformasi militer dan latihan militer (Marcel, 2014:161). Penjelasan ini semakin memperkuat urgensi peran diplomasi pertahanan sebagai instrumen penting dalam menggalang kerjasama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama.

Di era globalisasi, pertahanan nasional tidak bisa hanya dilihat dari perspektif domestik. Kerjasama internasional melalui diplomasi pertahanan menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, terutama di wilayah Indo-Pasifik yang semakin diperebutkan oleh kekuatan global seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Penguatan kerja sama internasional dan diplomasi pertahanan juga dapat menjaga perdamaian dunia dan pencegahan konflik, serta penguatan kapabilitas pertahanan negara; Indonesia, sebagai anggota ASEAN dan negara dengan posisi strategis di kawasan Indo- Pasifik, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan regional. Melalui diplomasi pertahanan, Indonesia dapat memperkuat aliansi dan kerjasama dengan negara-negara tetangga serta kekuatan global untuk menjaga stabilitas kawasan. Salah satu inisiatif penting yang telah diambil adalah ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) dan ADMM-Plus, yang mempertemukan menteri-menteri pertahanan ASEAN dan mitra eksternal seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Forum ini menyediakan ruang untuk berdialog dan menyelesaikan isu-isu keamanan yang sensitif, sekaligus mendorong kerjasama praktis dalam bidang seperti maritime security, counter-terrorism, dan humanitarian assistance. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat kerjasama militer dengan negara-negara besar melalui latihan militer gabungan, seperti Garuda Shield dengan Amerika Serikat dan kerjasama pertahanan dengan Tiongkok dan Jepang. Latihan militer gabungan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan operasional TNI, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik dan menciptakan stabilitas yang lebih besar di kawasan.

Di dalam implementasi diplomasi pertahanan, Indonesia harus memiliki prinsip diplomasi tangguh dimana diplomasi yang tangguh diperlukan agar Indonesia dapat merespons secara tepat dinamika internasional, termasuk geopolitik dan geoekonomi, membuka dan memanfaatkan peluang untuk pengembangan ekonomi, penguatan kerja sama pembangunan, penguatan posisi politik, pembangunan sosial dan budaya nasional, serta dapat meningkatkan peran dan pengaruh Indonesia di dunia internasional. Diplomasi tangguh

merupakan diplomasi total yang strategis, proaktif, sinergis, dan berkelanjutan antarbidang diplomasi meliputi kedaulatan, kepemimpinan, publik, perlindungan, dan ekonomi. Hal tersebut dilakukan oleh para pemangku kepentingan meliputi perumus kebijakan dan pelaku hubungan luar negeri lainnya, baik pemerintah maupun non pemerintah, didukung dengan modalitas diplomasi yang andal (aspek kelembagaan, sinergi kebijakan, dan penguatan infrastruktur diplomasi). Pelaksanaan diplomasi tangguh dilaksanakan secara konsisten mendukung tahapan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.



Gambar 2: Kerangka Diplomasi Tangguh

Sumber: RPJPN 2025-2045

Kebijakan luar negeri diarahkan agar Indonesia menjadi negara Nusantara yang berdaulat dan berpengaruh di lingkungan global terutama untuk mendukung ketahanan nasional dan memantapkan kepemimpinan Indonesia di Indo-Pasifik. Untuk mencapai sasaran tersebut arah kebijakan adalah sebagai berikut: (i). Penguatan peran dan kepemimpinan Indonesia berlandaskan identitas negara Nusantara sebagai agenda setter di tingkat regional dan global; (ii). Pemantapan tata kelola kebijakan luar negeri guna merespons dinamika geopolitik dan geoekonomi, serta disrupsi teknologi digital dan perubahan iklim; (iii). Penguatan Indonesia sebagai effective leader di ASEAN dan fora internasional lainnya; (iv). Penguatan diplomasi kedaulatan, hak berdaulat dan kerja sama keamanan internasional guna menjaga ketahanan

nasional serta stabilitas kawasan Indo- Pasifik; (v). Pemantapan kebijakan luar negeri yang mendukung ekonomi, maritim dan pembangunan berkelanjutan;

(vi). Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional (KPI) untuk memperteguh diplomasi; (vii). Pengintegrasian pemenuhan dan pelaksanaan komitmen internasional selaras dengan rencana pembangunan nasional, dan pemastian komitmen tersebut sejalan dengan norma dan konstitusi bangsa Indonesia; (viii). Pemajuan diplomasi publik melalui nilai, budaya dan ideologi guna peningkatan citra Indonesia di dunia internasional; (ix). Penguatan kerja sama internasional dan diplomasi pertahanan untuk menjaga perdamaian dunia dan pencegahan konflik, serta penguatan kapabilitas pertahanan negara; (x). Penguatan dan pengembangan kerja sama internasional yang responsif terhadap krisis dan bencana baik bencana alam maupun bencana non-alam; serta (xi). Penguatan perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia untuk mendukung perluasan investasi dan ekspor serta penciptaan migrasi aman. Dalam konteks diplomasi pertahanan, Indonesia juga perlu lebih aktif dalam memainkan peran mediasi di konflik regional, terutama dalam isu Laut China Selatan yang merupakan titik panas geopolitik di Asia Tenggara. Indonesia dapat memanfaatkan kebijakan luar negeri yang bebas aktif untuk memainkan peran sebagai mediator yang netral, sambil memperkuat kedaulatan maritim di wilayah Natuna Utara, yang sering menjadi sorotan dalam sengketa Laut China Selatan.

5. SIMPULAN

Transformasi strategi pertahanan Indonesia menuju tahun 2045 akan menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang memerlukan respon adaptif dan komprehensif dari pemerintah dan institusi pertahanan. Dari temuan utama yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa tantangan-tantangan tersebut tidak hanya berasal dari ancaman eksternal seperti dinamika geopolitik global, persaingan kekuatan besar, dan konflik regional, tetapi juga dari ancaman domestik dan non-konvensional seperti terorisme, serangan siber, dan perubahan iklim. Dalam konteks geopolitik, ketegangan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, serta rivalitas di kawasan Indo-Pasifik, berpotensi menciptakan ketidakstabilan di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mengingat posisi strategisnya di jalur perdagangan global dan sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia harus mampu menavigasi tekanan geopolitik ini melalui strategi pertahanan yang cerdas dan diplomasi yang efektif. Di

sisi lain, perubahan paradigma perang menuju perang hibrida dan konflik asimetris menuntut Indonesia untuk mengembangkan kemampuan pertahanan yang lebih dinamis. Ancaman seperti serangan siber dan kampanye disinformasi memerlukan perubahan signifikan dalam pendekatan pertahanan, terutama dalam mengintegrasikan teknologi mutakhir dan memperkuat keamanan siber nasional.

Indonesia juga dihadapkan pada keterbatasan anggaran pertahanan yang harus dikelola secara efektif untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan modernisasi militer. Dengan adanya tekanan pada anggaran, pengembangan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri menjadi semakin mendesak, bersama dengan reformasi kelembagaan dan birokrasi pertahanan yang lebih efisien. Pada saat yang sama, diplomasi pertahanan menjadi instrumen penting dalam mengamankan kawasan melalui kerjasama internasional dan aliansi multilateral. Dalam menghadapi semua tantangan ini, Indonesia membutuhkan strategi yang proaktif dan terencana dengan baik. Pengembangan kapasitas manusia, penguatan kerjasama pertahanan, serta peningkatan kemampuan teknologi dan siber adalah langkah-langkah penting yang harus diambil untuk memastikan kesiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman di masa depan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2023). Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPN 2025-2045.
- Bateman, Sam. (2021). "Indonesia and the Indo-Pacific: A Strategy in the Making." *The Pacific Review*, vol. 34, no. 3, 2021, pp. 321-341.
- Defense Ministry of Japan. (2023). *Defense of Japan 2023*. Ministry of Defense, Japan.
- Erlangga Pratama. (2015). "Wajah Politik Internasional Tahun 2016", Neraca, diakses pada website <http://www.neraca.co.id/article/63012/wajah-politik-internasionaltahun-2016>
- Friedman, George. (2009). *The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century*. Doubleday.
- Indrawan, R. J., & Widiyanto, B. (2016). KEBIJAKAN OFFSET DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN PERTAHANAN NEGARA. *Jurnal Pertahanan*.
- Gejolak Besar", *Epoch Times*, <http://erabaru.net/2016/08/09/analisis-terkinisituasi-politik-dunia-2016-2017-yang-penuhgejolak-besar>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2022- 2024*.

- Ministry of Defense of the Republic of Indonesia. (2021). White Paper on Defense of the Republic of Indonesia 2021. Ministry of Defense.
- Nye, Joseph S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. PublicAffairs.
- Rachmat, A. N. (2016). Tantangan dan Peluang Perkembangan Teknologi Pertahanan Global Bagi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Indonesia.
- United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA). (2022). *Military Spending and Global Security*. UNODA.
- Sitompul, Martin. "Modernizing Indonesia's Military: Challenges and Opportunities." *The Jakarta Post*, 2023.
- Slaughter, Anne-Marie. *The Chessboard and the Web: Strategies of Connection in a Networked World*. Yale University Press, 2017.
- Strachan, Hew. (2013). *The Direction of War: Contemporary Strategy in Historical Perspective*. Cambridge University Press.
- The World Bank. (2022). *The Role of Cybersecurity in Digital Development*. The World Bank.
- Thayer, Carlyle A. "ASEAN and the Challenge of Maritime Security in the South China Sea." *Asian Security*, vol. 15, no. 2, 2020, pp. 123-144.
- Yarger, Harry R. *Strategy and the National Security Professional: Strategic Thinking and Strategy Formulation in the 21st Century*. Praeger Security International, 2008.
- Zelikow, Philip. (2020). *Diplomacy and Statecraft in the 21st Century*. Harvard University Press. Zang Shan, 9 Agustus 2016, "Analisis Terkini Situasi Politik Dunia, 2016-2017.